

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI
BKKBN (BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL) DIVISI LATBANG
(PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN)**



Diajukan Oleh :

HALIMAH EVIA AGUSTINI

031180054

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja
Lapangan dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA : HALIMAH EVIA AGUSTINI

NOMOR POKOK : 031180054

PROGRAM STUDI : D3 SISTEM INFORMASI

JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)

**JUDUL : LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK
KERJA LAPANGAN DI BKKBN
(BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
NASIONAL) DIVISI LATBANG
(PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN)**

**Tanggal :
Pembimbing**

**Mengetahui,
Direktur**

Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom.
NIDN : 0204058602

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA : HALIMAH EVIA AGUSTINI

NOMOR POKOK : 031180054

PROGRAM STUDI : D3 SISTEM INFORMASI

JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)

JUDUL : LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK
KERJA LAPANGAN DI BKKBN
(BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
NASIONAL) DIVISI LATBANG
(PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN)

Tanggal : **Tanggal :**

Penguji 1 **Penguji 2**

Surahmat, S.Kom., M.Kom. **Yayuk Ike Meilani, S.Kom., M.Kom.**

NIDN : 0217058703 **NIDN : 0224059102**

Mengetahui,
Direktur

Benedictus Effendi, S.T., M.T.

NIP : 09.PCT.13

MOTTO

No knowledge is wasted in learning because knowledge will be useful in due time

(Tidak ada ilmu yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan Bermanfaat pada waktunya)

Kupersembahkan Kepada :

- Allah SWT
- Kedua orang tua
- Keluarga
- Saudara – saudaraku
- Dosen pembimbing
- Kantor Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan
- Teman Seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan rangkaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan membuat Laporan PKL berjudul “Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Di BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Divisi LATBANG (Pelatihan dan Pengembangan)”.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak Benedictus Effendi, S.T.,M.T., selaku Direktur Politeknik PalComTech. Bapak Andri Saputra, S.Kom.,M.Kom., selaku Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi. Ibu Meidyan Permata Putri S.Kom.,M.Kom., selaku Dosen Pembimbing, beserta Pembimbing Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dan semua akademisi yang terlibat dalam proses PKL.

Penulis berharap Laporan Kegiatan yang telah di buat dapat diterima dan semoga bisa bermanfaat untuk pengembangan intelektual dalam bidang teknologi informasi. Penulis menyadari bahwa laporan yang penulis buat masih mempunyai banyak kekurangan dan kiranya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi perbaikan di masa mendatang.

Palembang, 22 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan PKL	3
1.3 Manfaat PKL	4
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	4
1.3.2 Manfaat Bagi BKKBN.....	4
1.3.3 Manfaat Bagi Akademik	4
1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL	5
1.4.1 Tempat PKL.....	5
1.4.2 Waktu PKL	5
1.5 Teknik Pengumpulan Data	6
1.5.1 Wawancara.....	6
1.5.2 Observasi	7
1.5.3 Dokumentasi	7
BAB II KEADAAN UMUM TEMPAT PKL	9
2.1 Sejarah BKKBN	9
2.1.1 Periode Perintisan (1950 an-1966)	9
2.1.2 Periode keterlibatan pemerintah dalam program KB Nasional	10

2.1.3 Periode Pelita I (1969—1974)	11
2.1.4 Periode Pelita II (1974-1979)	11
2.1.5 Periode Pelita III (1979-1984)	12
2.1.6 Periode Pelita IV (1983-1988)	12
2.1.7 Periode Pelita V (1988-1993)	13
2.1.8 Periode Pelita VI (1993-1998)	14
2.1.9 Periode Pasca Reformasi	14
2.1.10 Periode sekarang	17
2.1.11 Sejarah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan	18
2.2 Visi dan Misi BKKBN	21
2.3 Struktur Organisasi	22
2.4 Uraian Tugas dan Wewenang	23
2.4.1 Bagian Tata Usaha	23
2.4.2 Bagian Supervisi	23
2.4.3 Bagian Bina Program	24
2.4.4 Bagian Pengolahan Data dan Penyebaran Informasi	25
2.4.5 Bagian Keluarga Berencana	25
2.4.6 Bagian Keluarga Sejahtera	26
2.4.7 Bagian Balai Pelatihan dan Pengembangan	26
2.4.8 Bagian Keuangan	27
BAB III HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL	28
3.1 Pelaksanaan Kerja	28
3.1.1 Mengikuti rapat persiapan akreditasi	28
3.1.2 Membuat surat tugas pelatihan	29
3.1.3 Rekapitulasi formulir pemantauan pelatihan	30
3.1.4 Rekapitulasi renstra provinsi	31
3.1.5 Rekapitulasi berkas pelatihan covid	32
3.1.6 Membuat <i>cover</i> pegawai LATBANG	33
3.1.7 Membantu mencatat surat masuk Divisi LATBANG	34
3.1.8 Membantu mencatat surat keluar Divisi LATBANG	34

3.1.9 Rekapitulasi surat masuk dan keluar Divisi LATBANG.....	35
3.1.10 Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	37
3.2 Kendala yang dihadapi	38
3.2.1 Kendala Divisi LATBANG	38
3.2.2 Kendala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.....	38
3.2.3 Kendala Kegiatan Selama PKL	38
3.3 Cara Mengatasi Kendala	39
3.3.1 Mengatasi Kendala Divisi LATBANG.....	39
3.3.2 Mengatasi Kendala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan ..	39
3.3.3 Mengatasi Kendala Kegiatan Selama PKL.....	40
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	xliii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	22
Gambar 3.1.1 Pelaksanaan rapat di BKKBN	29
Gambar 3.1.2 Membuat surat tugas pelatihan.....	30
Gambar 3.1.3 Rekapitulasi formulir pemantauan pelatihan.....	31
Gambar 3.1.4 Rekapitulasi renstra provinsi	31
Gambar 3.1.5 Rekapitulasi berkas pelatihan <i>Covid</i>	32
Gambar 3.1.6 Membuat <i>cover</i> pegawai LATBANG	33
Gambar 3.1.7 Membantu mencatat surat masuk Divisi LATBANG	34
Gambar 3.1.8 Membantu mencatat surat masuk Divisi LATBANG	35
Gambar 3.1.9 Rekapitulasi surat masuk dan keluar Divisi LATBANG	36

DAFTAR TABEL

Table 3.1.10 Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	37
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form Permohonan PKL (Fotocopy)*
2. Lampiran 2. *Surat Pernyataan Ujian (Fotocopy)*
3. Lampiran 3. *Form Pengajuan Judul PKL (Fotocopy)*
4. Lampiran 4. *Surat Balasan Riset (Fotocopy)*
5. Lampiran 5. *Form Penilaian Kerja Mahasiswa (Fotocopy)*
6. Lampiran 6. *Form Penilaian Pembimbing PKL (Fotocopy)*
7. Lampiran 7. *Form Absensi (Fotocopy)*
8. Lampiran 8. *Form Konsultasi (Fotocopy)*
9. Lampiran 9. *Form Revisi (Asli)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga yang berstatus sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera serta diharapkan juga memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup BKKBN.

Terdapat enam bidang yang ada di instansi BKKBN, diantaranya Bidang Kesekretarian, Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (ADPIN), serta Bidang Pelatihan dan Pengembangan (LATBANG). Selama masa PKL penulis ditempatkan di Divisi LATBANG adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama PKL

yaitu membantu pelaksanaan persiapan akreditasi Divisi LATBANG.

Menurut Lausa Isaberna S.Sos selaku Widyaiswara (Pengajar) Divisi LATBANG, BKKBN terkendala pada saat persiapan berkas pelatihan untuk pelaksanaan akreditasi dikarenakan arsip berkas pelatihan yang tidak tertata, laporan data pelatihan yang sering hilang karena masih menggunakan media penyimpanan berkas-berkas pelatihan secara manual yaitu menyimpan didalam gudang sehingga pada saat berkas-berkas tersebut diperlukan Divisi LATBANG harus mencari berkas tersebut terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian memutuskan untuk melakukan PKL di BKKBN dengan judul **Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di BKKBN(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Divisi LATBANG (Pelatihan dan Pengembangan).**

1.2 Tujuan PKL

Tujuan penulis melakukan PKL sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dalam Program Studi D3 Sistem Informasi Politeknik Palcomtech.
2. Agar dapat mempraktikan langsung ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan untuk langsung diterapkan di Instansi atau Perusahaan.
3. Agar bisa memahami menyelesaikan permasalahan yang ada di Instansi atau Perusahaan.

1.3 Manfaat PKL

Manfaat dilakukannya PKL bagi Mahasiswa Politeknik Palcomtech dan serta bagi BKKBN sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat PKL bagi mahasiswa sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman kerja.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan secara langsung melalui PKL.

1.3.2 Manfaat Bagi BKKBN

Manfaat PKL bagi BKKBN sebagai berikut:

1. Instansi/ Perusahaan mendapatkan tenaga kerja sementara.
2. Membantu Divisi LATBANG menyiapkan berkas pelatihan untuk pelaksanaan akreditasi.

1.3.3 Manfaat Bagi Akademik

Manfaat PKL bagi Akademik sebagai berikut:

1. Memperkenalkan mahasiswa Politeknik Palcomtech kepada publik.
2. Meningkatkan citra akademik.

3. Untuk melatih dan mendidik mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja agar dapat bersaing di dunia kerja yang sesungguhnya.
4. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa dari teori yang didapat selama perkuliahan melalui program PKL.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL

Berikut ini merupakan tempat dan waktu pelaksanaan PKL di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan:

1.4.1 Tempat PKL

PKL dilakukan di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Jalan Demang Lebar Daun No.4266 Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selama PKL, penulis ditempatkan di Divisi LATBANG.

1.4.2 Waktu PKL

Waktu PKL dilaksanakan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 21 September 2020 s.d 21 Oktober 2020. Kegiatan dilaksanakan setiap hari senin sampai jumat.

Peraturan PKL Di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a) Senin-Kamis Waktu masuk kerja adalah 08:00-16:00 dengan memakai baju putih dan rok dasar hitam.

- b) Jumat Waktu masuk kerja adalah 07:30-16:00 dengan memakai seragam batik dan celana dasar.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan PKL adalah:

1.5.1 Wawancara

Menurut Moleong di dalam penelitian (Desma Yulia dan David Tiaramon, 2017) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Untuk mendapatkan data-data yang akurat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. (Desma Yulia, 2017)

Penulis melakukan Wawancara Kepada Bapak H. Dharma Wijaya, M.M selaku Kepala Divisi LATBANG dan Ibu Lausa Isaberna S.Sos selaku Widyaiswara Divisi LATBANG Pada Hari Senin 28 September 2020. Wawancara dilakukan pukul 11:00-11:30 tujuan diadakan wawancara untuk mengetahui lebih lanjut tentang BKKBN terutama Divisi LATBANG. Hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi tentang permasalahan yang ada di Divisi LATBANG serta memperoleh data berupa struktur organisasi, visi-misi dan kendala pada saat persiapan berkas pelatihan untuk pelaksanaan akreditasi dikarenakan arsip berkas pelatihan yang tidak

tertata, laporan data pelatihan yang sering hilang karena masih menggunakan media penyimpanan berkas-berkas pelatihan secara manual yaitu menyimpan didalam gudang sehingga pada saat berkas-berkas tersebut diperlukan Divisi LATBANG harus mencari berkas tersebut terlebih dahulu.

1.5.2 Observasi

Menurut Sugiyono (2015: 145) di dalam penelitian (Hendik Prasetya, 2018) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang langsung diperoleh dari jawaban responden dengan cara mengadakan tanya jawab. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Prasetya, 2018)

Pada metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana suasana kerja dan tanggung jawab yang dilakukan Divisi LATBANG

1.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:194) di dalam penelitian (Noevie Susanti, Hamid Halin, M. Kurniawan, 2017) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. (Noevie Susanti, 2017)

Ditahap Dokumentasi, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa laporan data pelatihan covid, dan beberapa foto kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di instansi tersebut sebagai bukti bahwa memang benar penulis melaksanakan kegiatan PKL di instansi tersebut.

BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah BKKBN

Berikut merupakan sejarah umum Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional:

2.1.1 Periode Perintisan (1950 an-1966)

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Atau *Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF)*. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan. Tahun 1967, PKBI diakui oleh Depatemen Kehakiman.

Kelahiran orde baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air dengan lahirnya orde baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi perhatian pemerintahan yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran orde baru tersebut berpengaruh pada

perkembangan keluarga berencana. Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional 1 PKBI pada tanggal 25 Februari 1967. (BKKBN, 2020)

2.1.2 Periode keterlibatan pemerintah dalam program KB Nasional

Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DRPGR, Presiden Soeharto pada pidatonya, oleh karena itu kita harus menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila.

Sebagai tindak lanjut dari pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional. Pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain: membimbing, mengkoordinir, serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.

Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat. Instruksi Presiden tersebut

Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang pembentukan tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

2.1.3 Periode Pelita I (1969—1974)

Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.

2.1.4 Periode Pelita II (1974-1979)

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Periode ini, pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan Pendekatan

Integratif *Beyond Family Planning*. Kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan sebagai *pilot project*.

2.1.5 Periode Pelita III (1979-1984)

Periode ini dilakukan pendekatan Kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta Keluarga Berencana (KB) yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk "*Mass Campaign*" yang dinamakan "Safari KB Senyum Terpadu".

2.1.6 Periode Pelita IV (1983-1988)

Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Masa ini juga muncul pendekatan baru antara lain melalui Pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran ganda, yaitu selain sebagai dinamisor juga

sebagai fasilitator. Dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program.

Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.

2.1.7 Periode Pelita V (1988-1993)

Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih dijabat oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Periode ini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumber daya manusia dan pelayanan KB. Diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrasepsi.

Periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sektor Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan

keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.1.8 Periode Pelita VI (1993-1998)

Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu “Pendekatan Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian.

Pada tanggal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan.

2.1.9 Periode Pasca Reformasi

perundang-undangan yang telah ada dan rahan GBHN Tahun 1999, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan

kesejahteraan yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.

Era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis, sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Peraturan UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2).

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014

meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan kinerjanya.

2.1.10 Periode sekarang

Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa, setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumul C. Agoes Achir pada tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker dan yang kemudian terjadi kekosongan. Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes Departemen Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi Kepala BKKBN oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki masa pada tahun 2006 dan kemudian digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief, MPA yang dilantik sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 November 2006. Tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala BKKBN.

Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fasli Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan menjabat hingga tahun 2015.

Pada tanggal 26 Mei 2015 Presiden RI Joko Widodo menetapkan

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru yaitu dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D, yang dilantik oleh Menteri Kesehatan Prof. Nila F. Moeloek.

2.1.11 Sejarah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Keluarga Berencana di Sumatera Selatan telah dirintis sejak tahun 1960-an. Tokoh perintis KB di daerah ini adalah Ny. Gopito , Ny. Irsan Rajamin dan Ny. Bambang Utoyo dengan dr. Kwik Swie sebagai pelaksana medisnya. Tahun 1963 dibentuk organisasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) cabang Palembang. Pada Bulan Februari 1968, Presiden Soeharto menandatangani delegasi kependudukan sedunia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan/ Kepala BKKBN Nomor 11/HK.010/C4/94 tanggal 22 Februari 1994, tentang uraian pekerjaan pejabat Esselon III, IV, dan V di lingkungan BKKBN wilayah.

Pemerintah menyetujui program Nasional KB yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah hingga tanggal 17 Oktober 1968. Kemudian, dengan Surat Keputusan Nomor 26/KPT/Kesra/X/1996 terbentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus sebagai Lembaga Semi Pemerintah. Mempertimbangkan beberapa sistem, melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No 8 Tahun 1970 terbentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menangani beberapa hal yang

berkaitan dengan Sumatera Selatan. Maka, pada tahun 1974 program KB secara resmi dikelola oleh BKKBN.

Ketua BKKBN Provinsi Sumatera Selatan adalah M. Saman Halik, SH. Tahun 1979 gedung awal yang dipakai sejak BKKBN Provinsi Sumatera Selatan berdiri adalah gedung Rumah Sakit Paru- Paru di Jalan Merdeka Palembang. Kemudian organisasi BKKBN kembali disempurnakan dengan tujuan agar dapat mengatasi segala kekurangan dan melaksanakan program sebelumnya. Penyempurnaan organisasi BKKBN dilakukan berdasarkan KEPRES No. 38 Tahun 1978. Mengingat program KB Nasional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pelayanan KB Nasional perlu ditingkatkan lagi dengan jalan lebih memanfaatkan serta memperluas kemampuan fasilitas dan sumber daya yang tersedia, kemudian lebih menggiatkan dan mengefektifkan koordinasi serta keikutsertaan masyarakat. Tahun 1983 BKKBN mengalami penyempurnaan organisasi. Berdasarkan KEPRES N0. 1988 melalui GBHN 1988, program KB Nasional mulai dicanangkan menjadi gerakan KB.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan selama Periode 1974 hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1974-1977 :M. Saman Halik, SH
2. Tahun 1977-1979 :Letkol K. Achmad Mattjik
3. Tahun 1979-1981 :Letkol Dr. Hasan Zaini

4. Tahun 1981-1987 :Drs. Edyono Matheus
5. Tahun 1987-1991 :Drs. Mazwar Noerdin
6. Tahun 1991-1993 :Drs. Soetedjo Yuwono
7. Tahun 1933-1966 :Dr.H.Zainal Ichwan Ichlas
8. Tahun 1996-1998 :Dr.H.Abu Hanifah,MPH
9. Tahun 1998-2001 :Dr.Rusdi Satria Ridwan,MPH
10. Tahun 2001-2007 :Drs.H.Safaruddin Gumay,MM
11. Tahun 2008-2009 :Drs.H.Furqon laFarried,MA
12. Tahun 2009-2012 :Dr.M.Tri Tjahjadi,MPH
13. Tahun 2012-2013 :Dra.Sri Rahayu,M.Si
14. Tahun 2013-2015 :Drs.Aan Jumhana Mulyana,M.Si
15. Tahun 2015-2016 :Drs.Goedadi
16. Tahun 2016-2020 :Drs.Waspi
17. Tahun 2020-Sekarang :Nopian Andusti, SE, MT

2.2 Visi dan Misi BKKBN

Berikut ini merupakan Visi dan Misi BKKBN :

a) Visi

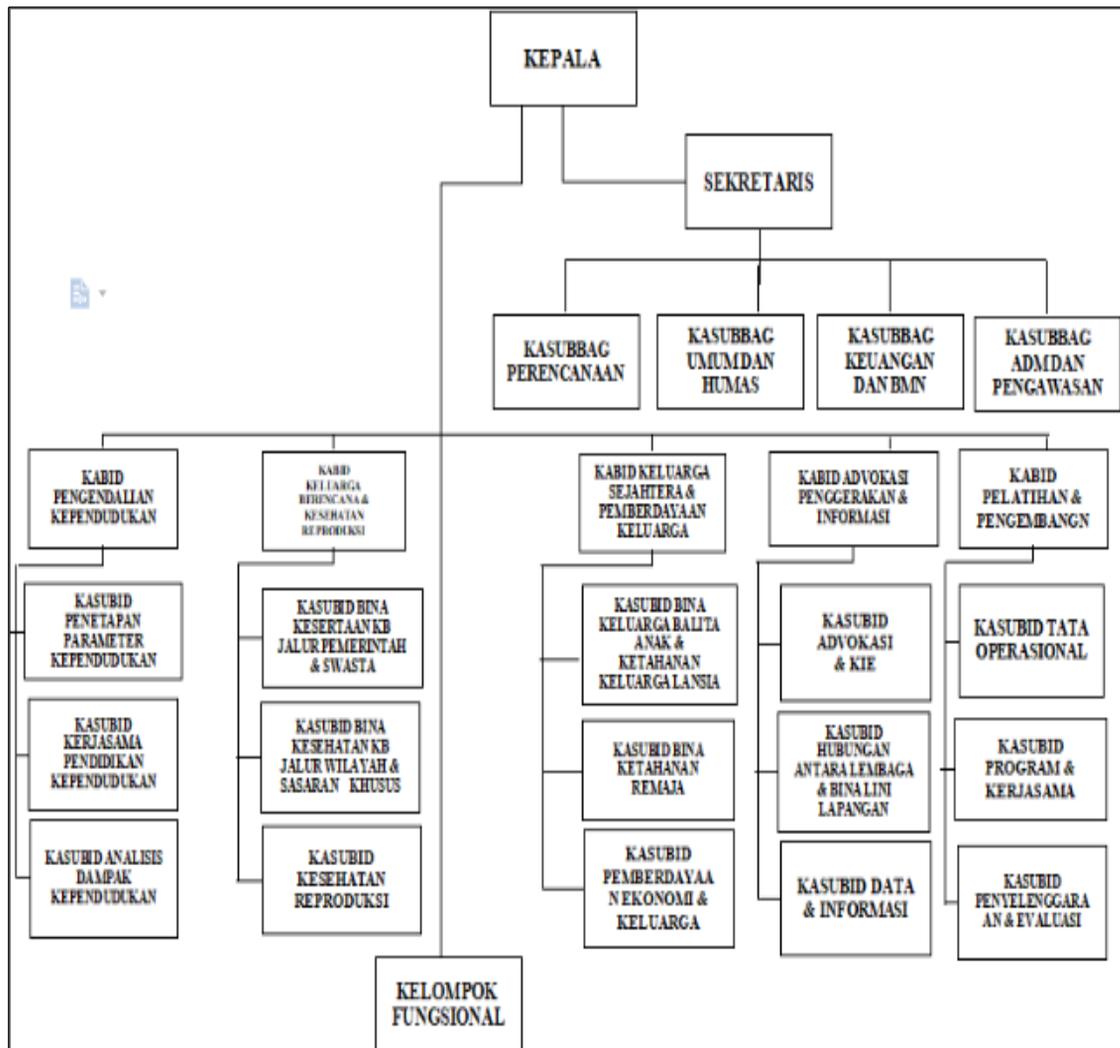
Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

b) Misi

- 1) Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
- 4) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- 5) Membangun dan menerapkan budaya kerja secara konsisten.

2.3 Struktur Organisasi

Berikut ini struktur organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan :



Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

2.4 Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas pokok struktur organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

2.4.1 Bagian Tata Usaha

1) Kasubag Urusan dan Protokol

Tugas: Menyiapkan pengolahan urusan dan keprotokolan gerakan Keluarga Bahagia (KB) dan pembangunan Keluarga Sejahtera (KS).

2) Kasubag Kepegawaian Tenaga Program

Tugas: Menyiapkan pengolahan pegawai di BKKBN.

3) Kasubag Surat Menyurat dan Tata Laksana

Tugas: Menyiapkan masalah surat menyurat menurut tata laksana gerakan KB dan pembangunan KS.

4) Kasubag Ketenagaan

Tugas: Melakukan pengolahan tenaga program KB dan KS.

2.4.2 Bagian Supervisi

1) Kasubag Supervisi Program

Tugas: Menyiapkan program KB dan KS.

2) Kasubag Ketenagaan dan Administrasi Umum

Tugas: Menyiapkan tenaga kerja administrasi umum KB dan KS.

3) Kasubag Keuangan dan Sarana

Tugas: Menyiapkan masalah keuangan dan sarana dalam gerakan KB dan KS.

2.4.3 Bagian Bina Program

1) Kasubag Seksi Analisa dan Penelitian

Tugas: Penyiapan penyusunan analisis dan penelitian pelaksanaan Gerakan KB dan KS.

2) Kasubag Seksi Penyusunan Program

Tugas: Menyiapkan penyusunan program dalam rangka gerakan KB Dan KS.

3) Kasubag Seksi Pelaporan Anggaran

Tugas: Menyiapkan Anggaran dalam gerakan KB dan KS.

4) Kasubag Seksi Pelaporan

Tugas: Menyiapkan pelaporan kependudukan dan gerakan KB dan KS.

2.4.4 Bagian Pengolahan Data dan Penyebaran Informasi

1) Kasubag Seksi Pengolahan Data

Tugas: Menyiapkan data kependudukan dalam gerakan KB dan KS.

2) Kasubag Seksi Penyebarluasan Informasi

Tugas: Menyebarluaskan informasi kependudukan di wilayah.

3) Kasubag Seksi Dokumentasi

Tugas: Menyiapkan dokumentasi data dan informasi kependudukan Dalam Program KB Nasional.

2.4.5 Bagian Keluarga Berencana

1) Kasubag Seksi Penerimaan dan Motivasi

Tugas : Menyiapkan pengolahan penerangan dan motivasi Kependudukan Gerakan KB dan KS.

2) Kasubag Seksi Pelayanan Kontrasepsi

Tugas: Menyiapkan pengolahan pelayanan kontrasepsi dalam gerakan KB dan KS.

3) Kasubag Seksi Peningkatan Masyarakat

Tugas: Menyiapkan pengolahan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kependudukan gerakan KB dan KS.

2.4.6 Bagian Keluarga Sejahtera

1) Kasubag Seksi Ketahanan Fisik Keluarga Sejahtera

Tugas: Menyiapkan pengolahan pengembangan ketahanan fisik keluarga Sejahtera dalam gerakan KB dan KS wilayah Provinsi.

2) Kasubag Seksi Ketahanan Non Fisik Keluarga Sejahtera

Tugas: Menyiapkan pengolahan operasional/pengembangan Kebijakan kependudukan di wilayah baru.

3) Kasubag Seksi Kependudukan

Tugas: Menyiapkan pengolahan operasional / pengembangan kebijakan kependudukan wilayah provinsi

2.4.7 Bagian Balai Pelatihan dan Pengembangan

1) Kasubag Seksi Penyelenggaraan dan Pelayanan

Tugas Menyiapkan penyelenggaraan pelaporan penduduk dan pelatihan kependudukan dalam gerakan KB dan KS.

2) Kasubag Seksi Penelitian dan Pengembangan

Tugas: Menyampaikan pengolahan penelitian dan pengembangan dalam gerakan KB dan KS.

3) Kasubag Seksi Bagian Tata Usaha

Tugas: Menyampaikan pengolahan ketatausahaan Balai Penelitian dan Pengembangan.

2.4.8 Bagian Keuangan

1) Kasubag Analisis Pelaksanaan Anggaran dan Pembukuan

Tugas: Melakukan persiapan analisis pelaksanaan anggaran dan pembelanjaan dalam gerakan KB dan KS.

2) Kasubag Seksi Bagian Pembendaharaan

Tugas: Menyiapkan pengolahan pembendaharaan gerakan KB dan KS.

3) Kasubag Pengadaan

Tugas: Menyiapkan pengolahan pengadaan dan perbekalan gerakan KB dan KS.

4) Kasubag Seksi Penyimpanan dan Penyaluran

Tugas: Penyiapan pengolahan dan penyaluran perbekalan, perlengkapan gerakan KB dan KS.

BAB III

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1 Pelaksanaan Kerja

Berdasarkan hasil kegiatan PKL di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan terhitung mulai dari tanggal 21 September 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020. Kegiatan yang dilakukan penulis berupa kegiatan untuk persiapan akreditasi karena pelaksanaan program kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi dilakukan dengan jarak jauh mengingat sekarang kondisi yang sangat tidak memungkinkan apabila kegiatan pelatihan dilakukan secara langsung.

Berikut kegiatan yang penulis lakukan selama PKL di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan di Divisi LATBANG :

3.1.1 Mengikuti rapat persiapan akreditasi

Kegiatan ini dilakukan di ruang rapat lantai 2 gedung perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Rapat ini dihadiri oleh seluruh staf Divisi LATBANG di koordinasi oleh Drs Dharma Wijaya selaku Kepala Bidang LATBANG menugaskan penulis ikut serta dalam melakukan persiapan pelaksanaan akreditasi. Tujuan diadakan rapat untuk mengevaluasi hal-hal yang diperlukan pada saat persiapan akreditasi.

Sebelum rapat dimulai penulis membantu mempersiapkan peralatan

yang digunakan untuk rapat dan selama rapat berlangsung penulis juga ditugaskan sebagai notulis untuk mencatat apa saja yang dibahas selama pelaksanaan rapat berlangsung.



Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.1.1 Pelaksanaan rapat di BKKBN

3.1.2 Membuat surat tugas pelatihan

Penulis diberi tugas untuk membuat surat tugas pelatihan yang ditugaskan oleh Ibu Yuhanis S.IP selaku kepala sub bidang tata operasional tujuannya untuk memberikan informasi kepada peserta pelatihan kapan diadakannya pelatihan.



Sumber :Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.1.2 Membuat surat tugas pelatihan

3.1.3 Rekapitulasi formulir pemantauan pelatihan

Penulis diberi tugas untuk rekapitulasi formulir pemantauan pelatihan yang ditugaskan oleh Ibu Yuhanis S.IP selaku kepala sub bidang tata operasional untuk merekap formulir pemantauan pelatihan tahun 2018-2019 adapun tujuan merekap formulir pemantauan pelatihan yaitu untuk berkas persiapan pelaksanaan akreditasi.



Sumber :Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.1.3 Rekapitulasi formulir pemantauan pelatihan

3.1.4 Rekapitulasi renstra provinsi

Penulis diberi tugas melakukan rekapitulasi renstra provinsi yang ditugaskan oleh ibu Yuhanis S.IP tujuan dilakukan rekapitulasi renstra provinsi untuk pelaksanaan persiapan berkas akreditasi.

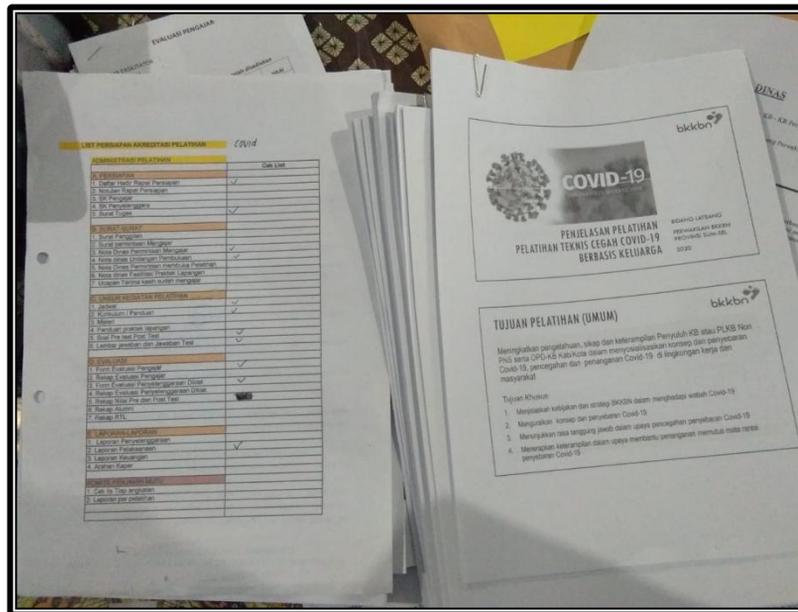


Sumber :Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.1.4 Rekapitulasi renstra provinsi

3.1.5 Rekapitulasi berkas pelatihan covid

Penulis diberi tugas untuk membantu kegiatan pengecekan rekapitulasi berkas pelatihan *covid* yang ditugaskan oleh ibu Yuhanis S.IP tujuan dilakukan rekapitulasi berkas pelatihan *covid* untuk pelaksanaan persiapan berkas akreditasi.

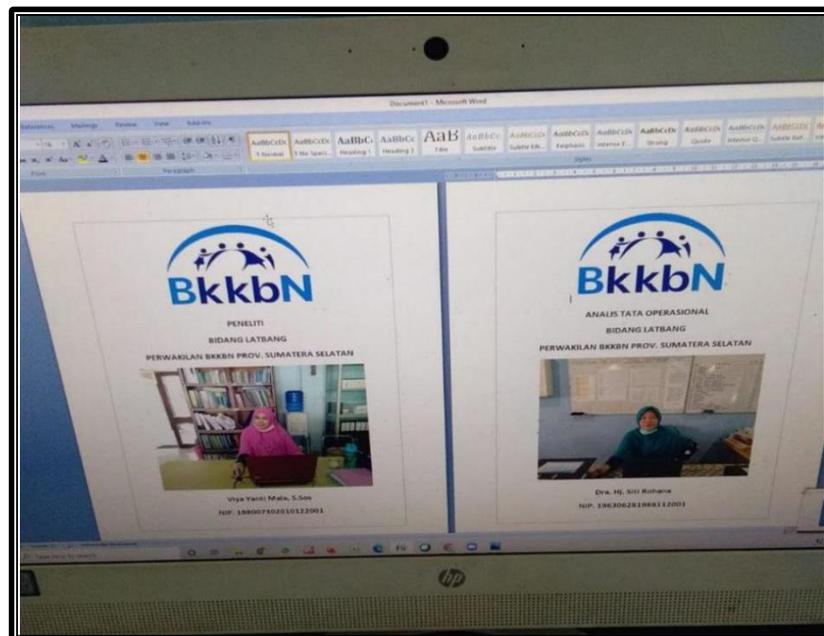


Sumber :Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.1.5 Rekapitulasi berkas pelatihan Covid

3.1.6 Membuat *cover* pegawai LATBANG

Penulis diberi tugas untuk membuat *cover* pegawai LATBANG yang ditugaskan oleh Ibu Lausa Isaberna S.Sos adapun tujuan pembuatan *cover* untuk pelaksanaan persiapan akreditasi dan tujuan dilaksanakannya akreditasi untuk mewujudkan suatu lembaga diklat yang profesional, handal dan berkualitas, diperlukan standarisasi prosedur penyelenggaraan kegiatan melalui akreditasi. Proses akreditasi ini bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas dalam segala aspek pegawai Divisi LATBANG agar dapat meningkatkan sumber daya manusia di BKKBN dan selanjutnya seluruh berkas tersebut akan dikirim ke BKKBN Pusat.



Sumber :Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.1.6 Membuat *cover* pegawai LATBANG

3.1.7 Membantu mencatat surat masuk Divisi LATBANG

Penulis diberi tugas untuk membantu mencatat surat masuk Divisi LATBANG yang ditugaskan oleh Ibu Yuhanis S.IP adapun tujuan pencatatan surat masuk Divisi LATBANG agar surat masuk dapat disimpan dan dikelola dengan baik sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan.



Sumber :Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.1.7 Membantu mencatat surat masuk Divisi LATBANG

3.1.8 Membantu mencatat surat keluar Divisi LATBANG

Penulis diberi tugas untuk membantu mencatat surat keluar Divisi LATBANG yang ditugaskan oleh Ibu Yuhanis S.IP adapun tujuan pencatatan surat keluar Divisi LATBANG agar mempunyai data pencatatan surat keluar.

EVALUASI PENGAJAR

NAMA FASILITATOR :
 NAMA DIKITA :
 MATERI :
 TANGGAL DIKLAT :

Berilah Nilai antara 1 s.d 5 pada kolom yang telah disediakan

No.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	Pencapaian tujuan pembelajaran	5
2	Penguasaan materi	4
3	Sistematika penyajian	4
4	Kemampuan menyajikan materi	5
5	Ketepatan waktu kehadiran	5
6	Pengelolaan waktu saat penyajian	5
7	Penggunaan metode dan pemanfaatan media	5
8	Keterampilan menjawab pertanyaan dari peserta	4
9	Pemberian motivasi kepada peserta	5
10	Kerapuhan berpakaian	4

Komentar/saran :
 Memuaskan

Keterangan :
 5 : Sangat Sesuai/Sangat Baik
 4 : Sesuai/Baik
 3 : Cukup Sesuai/Cukup
 2 : Kurang Sesuai/Kurang
 1 : Sangat Kurang

EVALUASI PENGAJAR

NAMA FASILITATOR :
 NAMA DIKITA :
 MATERI :
 TANGGAL DIKLAT :

Berilah Nilai antara 1 s.d 5 pada kolom yang telah disediakan

No.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	Pencapaian tujuan pembelajaran	4
2	Penguasaan materi	4
3	Sistematika penyajian	5
4	Kemampuan menyajikan materi	5
5	Ketepatan waktu kehadiran	5
6	Pengelolaan waktu saat penyajian	4
7	Penggunaan metode dan pemanfaatan media	4
8	Keterampilan menjawab pertanyaan dari peserta	4
9	Pemberian motivasi kepada peserta	3
10	Kerapuhan berpakaian	4

Komentar/saran :
 Sudah baik

Keterangan :
 5 : Sangat Sesuai/Sangat Baik
 4 : Sesuai/Baik
 3 : Cukup Sesuai/Cukup
 2 : Kurang Sesuai/Kurang
 1 : Sangat Kurang

Sumber :Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.1.8 Membantu mencatat surat masuk Divisi LATBANG

3.1.9 Rekapitulasi surat masuk dan keluar Divisi LATBANG

Penulis diberi tugas melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar Divisi LATBANG yang ditugaskan oleh Ibu Lausa Isaberna S.Sos adapun tujuan rekapitulasi surat masuk dan surat keluar untuk pelaksanaan akreditasi yang dimana surat masuk dan surat keluar diperlukan sebagai data akreditasi Divisi LATBANG.

14. Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, KB & PK Bagi Calon PKB PNS

No	Nama Berkas	ada	tidak	Keterangan
Rapat Persiapan				
1	Notulen	✓		
2	Daftar Hadir	✓		
3	Nota Dinas	✓		
Persiapan				
4	Surat Panggilan	✓		
5	Surat Undangan Narasumber	✓		
6	Surat Teklap	✓		
7	Nota Dinas Narasumber Bidang	✓		
8	Nota Dinas Pembukaan	✓		
9	Nota Dinas Penutupan	✓		
10	Jadwal Kegiatan	✓		
11	materi rdpms, RP	✓		
12	panduan pelatihan	✓		
13	panduan teklap	✓		
14	pre-post	✓		
15	k/o	✓		
16	Absen ✓	✓		
17	nilai pre-post	✓		
18	Evaluasi pengajaran	✓		
19	Evaluasi Narasumber	✓		
20	Laporan Penyelenggaraan	✓		
21	Laporan Pelaksanaan	✓		
22	Arahan Kepala	✓		
23	Laporan Komite	✓		
24	SK Narasumber	✓		
25	SK Penyelenggaraan	✓		
26	KTL	✓		

Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.1.9 Rekapitulasi surat masuk dan keluar Divisi

LATBANG

3.1.10 Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Dibawah ini merupakan laporan yang penulis lakukan selama PKL sebagai berikut :

Table 3.1.10 Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No	Tanggal	Hari	Laporan Kegiatan
1	21-09-2020	Senin	Perkenalan kepada pegawai BKKBN
2	22-09-2020	Selasa	Penempatan ruangan di Divisi LATBANG
3	23-09-2020	Rabu	<i>Scan</i> berkas dan <i>fotocopy</i> berkas
4	24-09-2020	Kamis	Membantu mencatat surat masuk Divisi LATBANG
5	25-09-2020	Jum'at	<i>Scan</i> berkas dan <i>fotocopy</i> berkas
6	28-09-2020	Senin	Membantu mencatat surat keluar Divisi LATBANG
7	29-09-2020	Selasa	Mengikuti rapat persiapan akreditasi LATBANG
8	30-09-2020	Rabu	Melakukan penyusunan berkas pelatihan
9	01-10-2020	Kamis	Membuat surat tugas pelatihan daring
10	02-10-2020	Jum'at	Melanjutkan membuat surat tugas pelatihan
11	05-10-2020	Senin	Mendata pengumpulan kegiatan LATBANG
12	06-10-2020	Selasa	Menyiapkan berkas akreditasi LATBANG
13	07-10-2020	Rabu	Rekapitulasi surat masuk dan keluar LATBANG
14	08-10-2020	Kamis	Rekapitulasi formulir akreditasi LATBANG
15	09-10-2020	Jum'at	Membantu <i>fotocopy</i> berkas
16	12-10-2020	Senin	Seleksi berkas diklat fungsional
17	13-10-2020	Selasa	Melanjutkan seleksi berkas diklat fungsional
18	14-10-2020	Rabu	Rekapitulasi form penilaian penyelenggara pelatihan
19	15-10-2020	Kamis	Rekapitulasi berkas pelatihan <i>covid</i>
20	16-10-2020	Jum'at	Membuat cover pegawai LATBANG
21	19-10-2020	Senin	Rekapitulasi penyelenggara diklat
22	20-10-2020	Selasa	Rekapitulasi renstra provinsi
23	21-10-2020	Rabu	Pelepasan Magang

3.2 Kendala yang dihadapi

Dibawah ini ada beberapa kendala yang penulis lakukan selama PKL sebagai berikut:

3.2.1 Kendala Divisi LATBANG

Kendala yang dihadapi penulis selama masa PKL pada Divisi LATBANG di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yaitu, kurang tertatanya berkas-berkas pelatihan yang disimpan karena dalam melakukan penyimpanan berkas didalam gudang dan disaat berkas tersebut diperlukan untuk persiapan akreditasi berkas terlebih dahulu harus di cari di gudang hal itu sangat meyita waktu banyak.

3.2.2 Kendala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Masalah yang ditemukan penulis selama masa PKL di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan adalah kurangnya alat tulis Kantor (ATK) yang diperlukan Divisi LATBANG dimana hal tersebut sangat membuat pekerjaan menjadi lambat selesai.

3.2.3 Kendala Kegiatan Selama PKL

Kendala yang dihadapi penulis selama PKL yaitu pegawai divisi LATBANG jam operasional kerjanya *Work From Home* dan

Work From Office dikarenakan kondisi pandemi yang harus mengikuti prosedur pemerintah. Sehingga kesulitan dalam melakukan persiapan akreditasi karena keterbatasan penulis bertatap muka kepada staff hal ini membuat waktu pengerjaan menjadi terhambat.

3.3 Cara Mengatasi Kendala

Dibawah ini merupakan beberapa cara yang dilakukan penulis untuk menghadapi kendala sebagai berikut:

3.3.1 Mengatasi Kendala Divisi LATBANG

Berdasarkan hasil pengamatan solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang terdapat di Divisi LATBANG yaitu dalam melakukan penyimpanan berkas yang sebelumnya melakukan penyimpan berkas didalam gudang diubah dengan menyimpan berkas menggunakan media penyimpanan seperti *Flashdisk* maupun *Hardisk*. Hasil dari penyimpanan berkas dengan menggunakan media tersebut diharapkan berkas-berkas pelatihan lebih tertata dan lebih memudahkan saat melakukan pencarian berkas.

3.3.2 Mengatasi Kendala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Cara yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sarana yang kurang memadai agar pengerjaan tugas menjadi tidak

terhambat yaitu membawa ATK sendiri sehingga dengan hal tersebut pengerjaan tugas kantor dalam pelaksanaan akreditasi cepat terlaksana.

3.3.3 Mengatasi Kendala Kegiatan Selama PKL

Solusi yang dilakukan di masa pandemi yaitu dengan membagi tugas pegawai yang dimana bagi pegawai jam operasionalnya *Work From Home* pengerjaan tugas untuk persiapan akreditasi dilakukan di rumah dan bagi pegawai yang jam operasionalnya *Work From Office* pengerjaan tugas dilakukan di kantor sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Kepala Bidang LATBANG agar persiapan akreditasi berjalan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan kegiatan PKL di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Divisi LATBANG, penulis merasakan sangat banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan yang di dapatkan. Selama melakukan PKL penulis mendapatkan kesimpulan dan manfaat dalam melakukan kegiatan PKL sebagai berikut:

- a. Penulis ikut serta bagaimana caranya berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melakukan rekapitulasi berkas pelatihan covid dalam rangka persiapan akreditasi Divisi LATBANG BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Divisi LATBANG masih menggunakan media penyimpanan berkas-berkas pelatihan secara manual yaitu menyimpan didalam gudang sehingga pada saat berkas-berkas tersebut diperlukan Divisi LATBANG harus mencari berkas tersebut terlebih dahulu.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan yang penulis lakukan selama PKL di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, penulis mempunyai saran terkait dengan PKL yang telah penulis laksanakan yaitu:

a. Rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan PKL ada baiknya sebelum pelaksanaan PKL mahasiswa perlu mengetahui bagaimana sistem atau aturan yang ada di tempat melakukan PKL tersebut.

b. Penulis menyarankan Divisi LATBANG sebaiknya mengubah dalam melakukan penyimpanan berkas-berkas pelaksanaan pelatihan yang sebelumnya menyimpan berkas didalam gudang diubah dengan menyimpan berkas menggunakan media penyimpanan seperti *Flashdisk* maupun *Hardisk* diharapkan dengan menggunakan media penyimpanan tersebut berkas-berkas pelatihan lebih tertata dan lebih memudahkan saat melakukan pencarian berkas.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2020, Desember 22). *Sejarah BKKBN*. Retrieved Desember 22, 2020, from Sejarah BKKBN: <http://www.BKKBN.go.id>.
- DesmaYulia, D. T. (2017). *PERANAN ORGANISASI IKATAN KELUARGA SUMATERA BARAT DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU DI KOTA BATAM TAHUN 2012-2016*, 8.
- Noevie Susanti, H. H. (2017). *JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI*, 44.
- Prasetya,H. (2018). Simki-economic Vol.02 No.03. *PENGARUH MOTIVASI, KOMPENSASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK BTPN KOTA KEDIRI*, 7-8.